



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 28, No. 2, Oktober 2014

ISSN - 0215-8809

- ☰ SEJARAH MANUSIA SEBAGAI SEJARAH PERADABAN: BELAJAR DARI FILSAFAT SEJARAH ARNOLD JOSEPH TOYNBEE
Sutarjo Adisusilo, J.R.
- ☰ NYAI DALAM PERGUNDIKAN: PENDORONG MUNCULNYA KAUM INDO DI HINDIA BELANDA
Hendra Kurniawan
- ☰ PENGGULINGAN PRESIDEN SOEKARNO DI BALIK PERISTIWA G30S
Yulius Dwi Cahyono
- ☰ INDIA-PAKISTAN PASCA KOLONIAL (1964-1975: SHASTRI-INDIRA)
B. Musidi
- ☰ FILIPINA DAN MASALAH SABAH
A. Kardiyat Wiharyanto

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

HISTORIA VITAE adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab/

Pemimpin Redaksi

Sekretaris Redaksi

Anggota Redaksi

: Dr. Anton Haryono, M.Hum.

: Hendra Kurniawan, M.Pd.

: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd.

Dra. Sumini Theresia, M.Pd.

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Yulius Dwi Cahyono, M.Pd.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Drs. B. Musidi, M.Pd.

REDAKTUR AHLI

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J., M.A. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dr. S. Nawiyanto Universitas Jember

SEKRETARIAT ADMINISTRASI

Junaidi Agus Sularto

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383

Telegram: SADHAR YOGYA

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	iii

<i>Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee</i>	107 - 135
<i>Sutarjo Adisusilo, J.R.</i>	

<i>Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda</i>	136 - 153
<i>Hendra Kurniawan</i>	

<i>Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S</i>	154 - 171
<i>Yulius Dwi Cahyono</i>	

<i>India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira)</i>	172 - 201
<i>B. Musidi</i>	

<i>Filipina dan Masalah Sabah</i>	202 - 214
<i>A. Kardiyat Wiharyanto</i>	

EDITORIAL

HISTORIA VITAE kali ini kembali menghadirkan lima artikel ilmiah dengan beragam tema. Diawali tulisan dari Sutarjo Adisusilo, J.R. yang mengkaji mengenai **Sejarah Manusia sebagai Sejarah Peradaban: Belajar dari Filsafat Sejarah Arnold Joseph Toynbee**. Tulisan berikutnya bertemakan Sejarah Sosial dari Hendra Kurniawan yang berjudul **Nyai dalam Pergundikan: Pendorong Munculnya Kaum Indo di Hindia Belanda**. Berikutnya Yulius Dwi Cahyono menyajikan tulisan tentang Peristiwa 1965 dengan judul **Penggulingan Presiden Soekarno di Balik Peristiwa G30S**.

Dua tulisan terakhir berasal dari dua orang dosen senior di Program Studi Pendidikan Sejarah. Tulisan B. Musidi memaparkan mengenai Sejarah Asia Selatan berjudul **India-Pakistan Pasca Kolonial (1964-1975: Shastri-Indira)**. Pungkasan, A. Kardiyat Wiharyanto kembali menambah pengetahuan kita mengenai Sejarah Asia Tenggara dengan menyajikan tulisan berjudul **Filipina dan Masalah Sabah**.

Akhir kata, selamat membaca dan terus berkarya.

Redaksi

FILIPINA DAN MASALAH SABAH

A. Kardiyat Wiharyanto

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah kepemilikan Sabah, proposal Malaysia mengenai Sabah, penolakan Filipina terhadap penggabungan Sabah ke dalam Malaysia, dan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Sabah. Hasil penulisan menunjukkan bahwa semula Sabah adalah milik Sultan Brunei, kemudian menjadi milik Sultan Sulu (Filipina), dan akhirnya dikontrakkan kepada sebuah kongsi milik orang Inggris. Setelah Inggris mau melepas Sabah, timbul klaim tumpang tindih antara Malaysia dengan Filipina. Malaysia yakin bahwa Sabah sudah dibeli bukan dikontrak oleh kongsi Inggris, sehingga akan dimasukkan menjadi bagian Malaysia. Filipina menolak penggabungan Sabah ke dalam Malaysia sebab Filipina yakin bahwa kongsi Inggris hanya kontrak sehingga tetap milik Sultan Sulu (Filipina). Masalah Sabah mereda setelah kedua negara (Malaysia dan Filipina) menjadi anggota ASEAN.

ABSTRACT

This article aims to describe the history of the ownership of Sabah, Sabah on the Malaysian proposal, rejection Philippines to Sabah incorporation into Malaysia, and efforts to resolve the matter of Sabah. The results showed that the original writing of Sabah is the Sultan of Brunei, then belonged to the Sultan of Sulu (Philippines), and finally contracted to a joint venture owned by the British. After the British want to take off Sabah, claims arising overlap between Malaysia and the Philippines. Malaysia confident that Sabah had not contracted by the joint venture purchased the UK, so it will be incorporated into a part of Malaysia. Philippines rejects incorporation into Sabah Malaysia Philippines believe that the joint venture because the UK only contract so as to keep the Sultan of Sulu (Philippines). Sabah

problem eased after the two countries (Malaysia and Philippines) became a member of ASEAN.

Keywords: Filipina, masalah Sabah.

PENDAHULUAN

Sabah adalah salah satu negara bagian Malaysia yang terletak di ujung utara pulau Kalimantan. Sejak Inggris memasukkan wilayah itu ke dalam jajahan Inggris di Asia Tenggara, maka mulai muncul klaim Filipina terhadap wilayah itu. Sengketa wilayah Sabah semakin naik ke permukaan setelah Persekutuan Tanah Melayu berkembang menjadi negara federasi Malaysia (1963).

Malaysia dan Filipina sangat meyakini bahwa Sabah adalah wilayahnya, akhirnya daerah tersebut menjadi sumber konflik dengan Filipina. Itulah sebabnya walaupun kedua negara tersebut sama-sama anggota ASEAN, bahkan kedua negara juga termasuk cikal-bakalnya, namun kenyataannya hubungan kedua negara itu sampai saat ini belum dapat dikatakan sudah ada saling pengertian.

Dalam beberapa kesempatan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad, dengan nada keras memperingatkan Filipina, bahwa negara itu tidak akan memiliki hubungan bilateral penuh dengan Malaysia, jika Filipina tidak mencabut klaimnya atas Sabah. Padahal Malaysia pernah mengakui dan mencatat tuntutan Filipina itu, tetapi karena perjalanan waktu, lama-lama seperti hampir lupa. Bahkan kemudian Malaysia menuduh Filipina bikin subversi di Sabah.

Apabila ditelaah dari tingkat hubungan bilateral antara Malaysia dan Filipina, serta ucapan-ucapan para pemimpin kedua negara itu tentang status Sabah, jelas bahwa Sabah menjadi sumber konflik yang akan berkepanjangan antara kedua negara. Mengingat bahwa Malaysia dan Filipina sama-sama menjadi anggota ASEAN yang tujuan utamanya adalah membina dan meningkatkan kerjasama antara para bangsa di Asia Tenggara ini, jelas bahwa masalah Sabah akan menjadi kendala besar, bagi bahwa masalah Sabah akan menjadi kendala besar, bagi terbinanya persaudaraan antar bangsa di kawasan itu.

SEJARAH SABAH

Pada tahun 1763 Sultan Amir dari Sulu, menyewakan tanah miliknya di Borneo kepada Serikat Hindia Timur (Inggris). Tanah itu diperolehnya dari Sultan Brunei pada tahun 1702. Sejak tahun 1802 Kerajaan Inggris menempatkan wilayah tersebut sebagai daerah jajahannya, tetapi tetap membayar kontrak kepada Sultan Sulu. Kemudian pada tahun 1850 dan 1865 Sultan Brunei menyerahkan kawasan Borneo Utara lainnya kepada Serikat Perdagangan Amerika.

Selanjutnya pada bulan Januari 1877, Serikat Perdagangan Amerika menjual kawasan itu kepada Konsul Besar Austria di Hongkong, Gustavus Baron de Overbeck dan Alfred Dent, seorang warga Inggris. Kedua orang itu kemudian menerima penyerahan kawasan Borneo Utara dari Sultan Brunei. Pada akhir tahun 1877 kedua orang itu memperpanjang konsesi itu dari Sultan Brunei. Sultan Brunei kemudian melantik Overbeck sebagai Maharaja untuk kawasan Sabah.

Dalam perkembangannya, Overbeck mengetahui bahwa bagian timur dari kawasan yang diserahkan oleh Sultan Brunei sebetulnya merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Sulu. Lantas kedua orang itu membujuk Sultan Sulu untuk menyewakan kawasan tersebut kepada mereka. Karena itu pada bulan Januari 1878 Overbeck dan Alfred Dent memperoleh tanah itu dari Sultan Sulu, Muhammad Jamal Al Alam, dengan sewa \$ 5000 pertahun. Overbeck kemudian menjual semua kawasan itu kepada Alfred Dent. Dent lantas mendirikan *The British North Borneo Company* pada tahun 1881, di bawah pengawasan raja Inggris. Sejak itu Inggris merasa memiliki seluruh wilayah Borneo Utara yang kemudian dikenal sebagai daerah Sabah.

Wilayah kekuasaan Inggris kemudian diperluas ke selatan dengan merampas daerah-daerah yang dikuasai Kesultanan Brunei. Bagian Barat Selatan adalah kawasan Serawak yang dikuasai oleh Dinasti Brooke sejak 1839. Dengan demikian Kesultanan Brunei terkurung oleh kedua wilayah kekuasaan Inggris. Dalam perkembangannya, *The British North Borneo Company* atau Kompeni Kalimantan Utara Inggris menambah tanah kontrakannya dengan Sultan Sulu berikutnya, yakni Jamalul Qirom, yakni pulau-pulau yang terletak di sebelah utara dan timur laut

Kalimantan Utara. Untuk pulau itu saja sewanya \$ 300 setahun. Jadi tanah plus pulau-pulau seluruhnya \$ 5300 setahun. Sampai tahun 1963, ternyata sewa-menyewa tersebut masih berjalan baik. Sesudah tahun itu, pembayaran macet. Alasannya, terjadi keruwetan ahli waris mana yang berhak. Pada tanggal 16 Juli 1946, daerah milik Sultan Sulu itu diklaim begitu saja oleh Inggris untuk dijadikan jajahannya (Milne and Diane K. Mauzy, 1984: 34).

PROPOSAL MALAYSIA

Serbuan Jepang ke kawasan Asia Tenggara berhasil mengalahkan dominasi Inggris dan Belanda di kawasan itu. Karena itu daerah Semenanjung Malaya, Singapura, Brunei, Sabah dan Serawak jatuh ke tangan Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, struktur kekuasaan Inggris di Asia Tenggara mengalami perubahan, tidak terkecuali kekuasaan di Sabah dan Serawak. Generasi ketiga Disnati Brooke menyerahkan Serawak kepada Kerajaan Inggris, demikian pula penguasa terakhir dari Sabah menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada Kerajaan Inggris. Sementara Brunei tetap berstatus Protektorat Inggris.

Tanggal 31 Agustus 1957, Semenanjung Malaya merdeka sebagai Persekutuan Tanah Melayu dengan bertukar negara Federal dan menganut sistem pemerintahan Monarki Konstitusional. Sementara Serawak, Singapura, Sabah dan Brunei tetap dikuasai Inggris. Pelopor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu adalah UMNO (United Malays National Organization). Partai itu mau menerima perserikatan dengan MCA (golongan Cina) dan MIC (golongan India), asal di kemudian hari negara-negara Melayu di Kalimantan Utara digabungkan ke dalam Malaysia (Ibrahim Yaakoob, 1957: 68).

Atas desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Inggris bermaksud melepaskan semua jajahannya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu di Singapura, Serawak, Sabah dan Brunei diberikan kebebasan untuk membentuk partai-partai politik. Tahun 1959, *People's Action Party (PAP)* memenangkan pemilihan umum di Singapura, dan Lee Kuan Yew dilantik sebagai Ketua Menteri. Pada saat yang sama, pemerintahan Lee mendapat tekanan dari Gerakan Partai Komunis.

Untuk menyelamatkan Singapura dari cengkeraman pihak komunis, Lee mengusulkan kepada Inggris untuk menggabungkan Singapura ke dalam Persekutuan Tanah Melayu. Pada saat Inggris menyetujui usulan itu, PM Persekutuan Tanah Melatu, Tengku Abdul Rahman Putra menolak gagasan Lee. Secara politis, formula itu akan mengancam *Malay Paramountcy (Ketuanan Puak Melayu)*, sebab penggabungan Singapura ke dalam Persekutuan Tanah Melayu akan memperbesar jumlah orang Cina (Tan Ding Eng, 1978: 11).

Pertama, karena jumlah penduduk Cina di Semenanjung dan di Singapura secara kualitas akan melebihi jumlah penduduk ras Melayu. Kedua, penduduk Melayu pada umumnya masih jauh ketinggalan dibandingkan dengan etnik Cina, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang ekonomi.

Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman hanya menyetujui Singapura bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu apabila Sabah, Serawak dan Brunei juga ikut bergabung. Dengan demikian keseimbangan ras Melayu dan Cina tetap terpelihara, dan ini akan menjamin kekuasaan politik etnis Melayu. Karena problem orang Melayu yang sesungguhnya yakni jumlahnya yang sedikit (lebih kecil) bila dibanding jumlah etnis lainnya (Cina dan India) (Amry Vandenboch and Richard A. Butwell, 1957: 207).

Inggris cenderung menerima gagasan tersebut, sehingga pada tanggal 21 Mei 1961 Tengku Abdul Rahman mengumumkan proposal pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Brunei dan Serawak. Dasar klaim Malaysia atas Sabah adalah surat perjanjian tahun 1878 yang menyebutkan bukanlah suatu kontrak (sewa-menyewa), melainkan suatu penyerahan. Dengan demikian Kumpeni Inggris di Kalimantan Utara bukan penyewa melainkan memiliki kedaulatan atas Sabah.

Di tahun 1888 Pemerintah Inggris memproklamasikan berdirinya Protektorat Sabah. Di tahun 1946 Pemerintah Inggris mengadakan persetujuan yang karenanya menyebabkan pihak Kumpeni Inggris menyerahkan Sabah dan sekitarnya kepada Pemerintah Inggris. Pada tanggal 16 Juli 1946 Pemerintah Inggris mengumumkan secara sepihak

untuk memasukkan seluruh wilayah Kalimantan Utara sebagai jajahan Inggris.

Manakala pengumuman Tengku Abdul Rahman disambut meriah di Jazirah Melayu dan Singapura, rakyat Borneo menolak gagasan itu. Donald Stephen, *Huguan Sio* (Pemimpin Tertinggi) puak Kadazan di Borneo Utara, Azhari Ketua *Brunei People's Party* dan Ong Kee Hui, Ketua Serawak *United People Party* kemudian membentuk *United Front* untuk menentang pembentukan Federasi Malaysia (James P. Ongkili, 1985: 161).

FILIPINA MENOLAK PENGGABUNGAN SABAH KE DALAM MALAYSIA

Gagasan Malaysia tidak hanya ditolak dari dalam, (khususnya golongan kiri) (Mahathir Mohamad, 1985: 135), tetapi juga oleh Presiden RI Ir. Soekarno dan Presiden Filipina D. Macapagal, yang secara terbuka menentang proposal itu. Presiden Soekarno mengatakan bahwa pembentukan Malaysia tidak akan mengubah status koloniasai terhadap Sabah dan Serawak.

Sementara itu Presiden Macapagal mengajukan klaim bahwa Sabah adalah bagian dari Filipina, seperti yang tertuang dalam Konstitusi Negara itu. Maka ia mengajukan tuntutan secara resmi kepada Inggris untuk mengembalikan wilayah itu lewat Pengadilan Internasional. Menurut Presiden Macapagal, dasar tuntutan Malaysia dan Inggris atas Sabah adalah tidak sah dan menyangkal dirinya sendiri. Surat perjanjian tahun 1878 adalah bukan penyerahan kedaulatan tetapi kontrak sewa. Pemerintah Inggris sendiri mengakui bahwa mereka harus membayar sewa setiap tahun secara rutin sejak 1878 samapi tahun 1946. Walaupun Inggris secara terang-terangan tidak menyebut sebagai uang sewa, tetapi Inggris terus membayarnya setiap tahun.

Sewaktu Inggris memproklamasikan perlindungan atas Kalimantan Utara (Sabah) di tahun 1888, pemerintah Inggris mengakui bahwa Ratu hanya memegang peranan sebagai pelindung tetapi tidak memegang hak-hak kedaulatan atas wilayah tersebut. Tindakan ini tidak menjadi sumber kedaulatan yang sah menurut hukum.

Status suatu protektorat Inggris diberikan kepada *North Borneo Company* yang mulai cemas akan keselamatan konsesinya olah karena hadirnya kekuasaan-kekuasaan asing di sekitar itu. Kekuasaan-kekuasaan asing ini menginginkan wilayah tersebut. Itulah sebabnya *British North Borneo Company* menghendaki hadirnya Angkatan Laut Inggris di sekitar itu.

Pemasukan wilayah Sabah secara sepihak di tahun 1946 didasarkan atas penyerahan yang dilakukan oleh pihak *British North Borneo Company* untuk keuntungan Kerajaan Inggris. Tetapi karena kongsi itu hanya memperoleh hak-hak sewaan di tahun 1878 berdasarkan wewenang dan kedaulatan Sultan Sulu semata-mata, maka kongsi itu tidak mempunyai kedaulatan yang dapat diserahkan secara sah menurut hukum kepada Pemerintah Inggris. Sudah barang tentu, kalau Pemerintah Inggris memperoleh kedaulatan atau menuntut hak kedaulatan atas Sabah berdasarkan persetujuan protektorat di tahun 1888, maka Filipina menilai bahwa penyerahan di tahun 1946 bertentangan dengan persetujuan tahun 1878. Dengan demikian Filipina lebih berhak ketimbang Malaysia.

Untuk memperkuat tuntutan Filipina atas Sabah, maka pada tanggal 24 April 1962 konggres mengesahkan lagi resolusi untuk kuasa bertindak. Isinya: mendesak Presiden Macapagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan hukum internasional untuk memperoleh kembali bagian tertentu dari Kalimantan Utara berikut pulau-pulau di dekatnya, yang menjadi hak Filipina. Pernyataan Konggres ini mendapat dukungan luas. Menurut Konggres, situasi Kalimantan Utara bukan sekedar masalah menghapuskan kolonialisme, melainkan masalah pengembalian suatu teoriti kepada pemiliknya yang sah.

Sebelum lahirnya Federasi Malaysia, Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya tuntutan Filipina itu. Perhatian Pemerintah Persekutuan Tanah Melayu terhadap tuntutan Filipina dapat dilihat dari Surat Peringatan Filipina tanggal 2 Agustus 1962 yang menyatakan bahwa Kalimantan Utara yang merupakan salah satu wilayah yang diusulkan untuk dimasukkan ke

dalam Federasi Malaysia adalah kepunyaan Kesultanan Sulu, dan Inggris tidak punya kedaulatan atas wilayah itu.

Persekutuan Tanah Melayu mengakui Surat Peringatan itu dalam surat jawabannya tanggal 3 Oktober 1962 yang menyatakan bahwa Pemerintah Inggris dan Persekutuan Tanah Melayu sedang berusaha bagi tercapainya persetujuan resmi mengenai penyerahan wilayah Borneo ke dalam wilayah Federasi Malaysia.

Pada tahun 1963, Inggris menyerahkan semua daerah jajahannya di Jazirah Melayu dan Kalimantan Utara (kecuali Brunei) kepada Malaysia (Milton Asborne, 1979: 186). Sejak itu mulai muncul masalah pembentukan Federasi Malaysia itu, yang buntutnya berkembang menjadi sengketa berkepanjangan antara Malaysia dan Filipina, bahkan pecah konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia.

Sesungguhnya penggabungan seluruh jajahan Inggris tersebut antara lain juga disebabkan adanya sikap kelompok nasionalis Melayu yang ingin menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Indonesia, agar jumlah orang Melayu menjadi mayoritas di negerinya. Konfrontasi yang dilakukan terhadap Malaysia bukan karena adanya keinginan sekelompok kaum nasionalis Melayu untuk bergabung dengan Indonesia, melainkan sekedar prosedur pembentukan federasi ini. Sebaliknya Filipina melakukan konfrontasi karena masalah teritorial. Di dalam situasi ini, Filipina masuk dan ambil kesempatan penting. Antara lain: meminta dukungan Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal persetujuan yang telah dihasilkan bersama.

Pertama, Persetujuan Manila, 31 Juli 1963, ditandatangani oleh Tengku Abdul Rahman, Diosdado Macapagal dan Soekarno. Pasal keempat berbunyi "Berdasarkan semangat bersama yang konstruktif itu juga, maka mereka telah mengadakan pertukaran pikiran mengenai usul konfederasi bangsa-bangsa keturunan Melayu, usul Federasi Malaysia dan demikian pula mengenai tuntutan Filipina atas Borneo Utara serta soal-soal lain yang bersangkutan. Dalam pasal kedua belas berbunyi "Filipina menjelaskan bahwa sikapnya mengenai pemasukan Sabah ke dalam Federasi Malaysia tergantung pada hasil terakhir dari tuntutan Filipina tersebut dan hak Filipina untuk meneruskan tuntutannya itu

sesuai dengan hukum internasional dan asas penyelesaian sengketa secara damai. Mereka bersepakat bahwa pemasukan Sabah ke dalam Federasi Malaysia tidak akan mengurangi baik tuntutan maupun sesuatu hak yang berdasarkan tuntutan tersebut.

Dalam rangka kerjasama yang erat, Ketiga Negara bersepakat untuk berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan tuntutan itu seadil-adilnya dan secepat-cepatnya dengan cara damai, seperti perundingan, konsiliasi, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan serta cara-cara damai lainnya yang dipilih sendiri oleh pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Piagam PBB dan Deklarasi Bandung.

Kedua, Pernyataan Bersama Manila yang ditandatangani oleh Tengku Abdul Rahman, Diosdado Macapagal dan Soekarno sehabis KTT Manila dari 30 Juli sampai 5 Agustus 1963, pasal yang kedelapan menyatakan "Sesuai dengan paragraf 12 dari Persetujuan Manila, ketiga Kepala Pemerintahan telah memutuskan untuk meminta Pemerintah Inggris agar menyetujui untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil dan cepat dari persengketaan antara Pemerintah Inggris dengan Pemerintah Filipina mengenai Sabah (North Borneo) dengan jalan perundingan, konsiliasi dan arbitrase, penyelesaian melalui pengadilan, atau cara yang damai lainnya yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Ketiga Kepala Pemerintahan menyadari kedudukan tuntutan Filipina atas Sabah (North Borneo) setelah terbentuknya Federasi Malaysia sebagaimana ditentukan dalam paragraf 12 Persetujuan Manila, yaitu bahwa pemasukan Sabah (North Borneo) ke dalam Federasi Malaysia tidak mengurangi baik tuntutan maupun sesuatu hak berdasarkan tuntutan di atas.

Ketiga, pernyataan Bersama Indonesia-Filipina, ditandatangani di Manila tanggal 11 Januari 1964 oleh Presiden Soekarno dan Presiden Diosdado Macapagal. Pasal yang ke-7 berbunyi: Presiden Soekarno sekali lagi menyatakan kepada Presiden Macapagal akan sokongan Indonesia terhadap klaim Filipina atas Sabah dalam rangka prinsip penentuan nasib sendiri. Presiden Macapagal menyatakan penghargaan atas perhargaan ini.

USAHA-USAHA PENYELESAIAN

Akibat tantangan Indonesia dan Filipina, maka Federasi Malaysia yang diharapkan akan diproklamasikan tanggal 31 Agustus 1963 bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Malaya yang ke-6, terpaksa ditunda. Di samping itu, Tengku Abdul Rahman juga menanti survey PBB terhadap pendapat rakyat Kalimantan Utara yang baru diselenggarakan tanggal 16 Agustus dan baru berakhir tanggal 5 September 1963. Karena kepiawaian diplomasi Inggris, dan Tengku Abdula Rahman, maka PBB melaporkan bahwa sebagian besar rakyat Kalimantan Utara ingin bergabung dengan Malaysia (James P. Ongkili, 1985: 74).

Berdasarkan hasil pendapat rakyat yang dilakukan oleh PBB tersebut, maka Federasi Malaysia kemudian berhasil diproklamasikan juga, yakni pada tanggal 16 September 1963. Adapun wilayah Malaysia yang diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963 itu terdiri dari 13 negara bagian, termasuk Sabah. Dengan munculnya Federasi Malaysia tersebut, maka Soekarno menyatakan perang terhadap Inggris dan menolak pembentukan Negara Boneka Malaysia. Konflik bersenjata tidak adapat dielakkan. Peristiwa ini terkenal dengan nama Konfrontasi.

Berbeda dengan Soekarno yang menempuh jalan kekerasan, Macapagal ternyata bersikap lebih lunak. Ia tidak melakukan serangan bersenjata terhadap Federasi Malaysia meskipun tetap getol mengklaim bahwa Sabah adalah bekas kekuasaan Kesultanan Sulu yang kemudia menjadi kawasan Republik Filipina.

Konfrontasi kemudian berakhir setelah Presiden Soekarno turun dari puncak kekuasaannya. Sementara Indonesia di bawah Presiden Soeharto menandatangani perdamaian dengan Malaysia, Indonesia tidak mengklaim bahwa Sabah adalah bagian dari Indonesia, kecuali dua buah pulau, yakni Sipidan dan Ligitan yang terletak di Laut Sulawesi.

Setelah suasana konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia sudah berbalik jadi mesra, namun tidak demikian halnya dengan Filipina. Maklum, di sana sini masih ada soal yang nyangkut. Walaupun jabatan presiden sudah berganti tangan dari Macapagal kepada Marcos, soal bagian dari Sabah itu tetap jadi duru dalam daging. Seperti halnya

Macapagal, Marcos juga menempuh jalan damai, tetapi tetap tidak mau melepaskan secara resmi tuntutan Filipina atas Sabah itu. Filipina berpendapat bahwa pengambilan seluruh wilayah jajahan Inggris oleh Malaysia (kecuali Brunei) adalah tidak benar (Sekretariat Nasional ASEAN, 1986: 157).

Pada tahun 1967 Indonesia, Malaysia dan Filipina bersama-sama dengan Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok yang melahirkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, maka terjadilah hubungan yang erat antara Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Namun demikian, masalah Sabah tetap menjadi kendala hubungan antara Malaysia dan Filipina.

Pada masa Tun Mustapha menjadi *Chief Minister* di Sabah (1965_1975), ia mendukung gerakan separatis di Filipina Selatan (Bangsa Moro) yang berjuang untuk memperoleh kemerdekaan dari Filipina. Selain itu, Mustapha memberikan bantuan finansial dan militer kepada bangsa Moro. Tun Mustapha adalah salah satu keturunan Sultan Sulu. Pada masa itu Filipina menuduh Malaysia memberikan perlindungan secara resmi dan membantu menyuplai logistik dan persenjataan, dan latihan militer kepada bangsa Moro. Malaysia tentu saja menolak tuduhan Filipina tersebut.

Dalam bulan Maret 1968 terjadi Peristiwa Corredor. Peristiwa ini mungkin tidak ketahuan, andaikata tidak dibeberkan oleh Senator Benigno Aquino dan anggota Konggres Rasjud Lukman. Kedua tokoh oposisi itu melancarkan dua tuduhan sekaligus. Pertama, Presiden Marcos menyiapkan pasukan komando rahasia yang seluruhnya terdiri dari pemuda-pemuda Islam untuk diterjunkan di Sabah. Kedua, pasukan itu akan digunakan juga untuk “tukang pukul” di saat pemilihan umum. Pusat latihan komando di Corridor itu terbingkar akibat pemberontakan melawan atasan semata-mata karena soal gaji yang terlambat. Banyak korban jatuh di antara peserta. Tentu saja tuduhan pihak oposisi itu perlu disaring. Tetapi satu hal yang jelas, Presiden Marcos meneruskan tuntutan teritorial dari presiden sebelumnya.

Pada tahun 1976, Sabah diperintah oleh Datuk Harris Mohd Salleh.

Pada akhir tahun itu, Presiden Marcos berkunjung ke Sabah. Untuk tidak mengakui kedaulatan Malaysia atas Sabah, ia hanya menyinggahi Pulau Labuan yang telah dijadikan wilayah Federal Malaysia, dan bukan wilayah Sabah. Pada tahun 1977 ASEAN memprakarsai pertemuan antara dua negara, Malaysia dan Filipina. Dalam pertemuan tersebut terdapat semacam konsensus antara kedua pihak, yakni Filipina sanggup menutup tuntutan atas Sabah (dalam arti tidak mengangkat ke permukaan), tetapi dengan catatan asal Malaysia tidak mendukung atau memberi bantuan kepada gerakan Moro (Sar Desai, 1981: 392).

Ketika Corazon Aquino berkuasa di Filipina (1986), sejumlah usaha telah dilakukan untuk mencabut klaim negara itu terhadap Sabah. Akan tetapi, para anggota Konggres tidak menyetujui langkah itu. Pemerintah Filipina minta minta agar pemerintah Malaysia memahami sikap para anggota Konggres Filipina itu. Namun pemerintah PM Mahathir Mohamad agaknya tidak mau berkompromi sedikitpun terhadap kasus Sabah ini, bahkan iapun mengancam untuk menurunkan tingkat hubungan antara Malaysia dan Filipina, apabila Filipina belum mencabut klaimnya atas Sabah.

Bagi Filipina, untuk mencabut klaim itu perlu mengamandemen undang-undang dasarnya. Untuk itu diperlukan persetujuan anggota Konggres dan Senat, dengan suara mayoritas. Jika demikian, persoalannya itu tidak sederhana. Dalam konteks bilateral, ancaman Mahathir mempengaruhi hubungan kedua negara. Sementara itu, kedua negara adalah sama-sama anggota ASEAN. Perselisihan yang menyangkut masalah fundamental antar dua negara anggota ASEAN akan berimplikasi negatif terhadap kelangsungan kerjasama secara keseluruhan. Ini sangat disayangkan, apalagi ASEAN merupakan Asosiasi Bangsa-Bangsa yang eksistensinya semakin meonjol dalam percaturan politik internasional.

Walaupun kedua negara merupakan anggota ASEAN, tetapi masalah Sabah merupakan harga diri bagi kepentingan nasionalnya. Karena itu kedua pihak terus berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing. Hal ini disebabkan masalah tersebut sudah berurat berakar sejak masa sebelumnya. Setelah kedua negara memperoleh kemerdekaan,

ternyata mereka mendapat warisan permasalahan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, kedua negara berusaha menunjukkan bukti-bukti kebenaran klaimnya atas Sabah, tetapi pihak lain belum bisa menerima sebagai suatu bukti yang meyakinkan. Karena menghadapi jalan buntu, Filipina berusaha mencari forum lain sebagai jalan baru pemecahan masalah, yakni Mahkamah Internasional. Namun pihak Malaysia tidak bisa menerima, sebab lebih senang kalau diselesaikan secara bilateral. Dalam penyelesaian masalah Sabah, kiranya yang penting bukan cepat selesainya, tetapi bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik dan diterima oleh kedua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amry Vandenbosch and Richard A. Butwell. 1957. *Southeast Asia Among The World Powers*. Lexington: University of Kentickey Press.
- Hall, D.G.E. 1970. *A History of South East Asia*. New York: St. Martin's Press.
- Ibrahim Yaakoob. 1957. *Sekitar Malaya Merdeka*. Kesatuan Malaya Merdeka.
- Mahathir Mohamad. 1985. *Dilema Melayu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Milne and Diane K. Mauzy. 1984. *Malaysia Tradition Modernity and Islam*. London: Westview Press.
- Milton Asborne. 1979. *Southeast Asia an Illustrated Introductory History*. Sydney: George Allen and Unwin.
- Sar Desai. 1981. *South East Asia Past and Present*. Vikas Publishing PVT LTD.
- Sekretariat Nasional ASEAN. 1986. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Deplu RI.
- Tan Ding Eng. 1978. *Sejarah Malaysia dan Singapura*. Kualalumpur: Fajar Bakti.